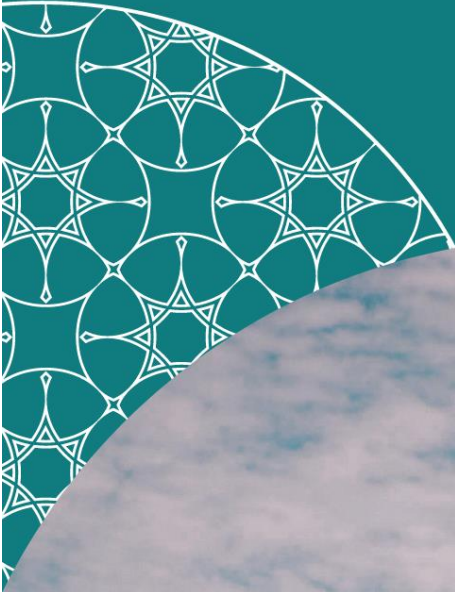




INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MALANG

2020



<https://malangkota.bps.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MALANG

2020





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MALANG 2020

No. ISBN	: -
No. Publikasi	: 35730.2201
Katalog	: 4102004.3573
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: vi + 41 halaman
Naskah	: Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Desain Kover oleh	: Christiayu Natalia
Penerbit	: BPS Kota Malang
Sumber Ilustrasi	: www.canva.com www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN



Pengarah:

Erny Fatma Setyoharini

Penyunting:

Henry Soeryaning Handoko

Penulis :

Christiayu Natalia

Pengolah Data :

Christiayu Natalia

<https://malangkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upaya tersebut, diperlukan berbagai indikator yang dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang berupaya untuk menyajikan indikator kesejahteraan rakyat dalam bentuk infografis serta ulasan terkait indikator tersebut. Harapannya, publikasi ini dapat menyampaikan gambaran kondisi kesejahteraan rakyat Kota Malang dari segi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pengguna data.

Malang, Desember 2021
Kepala BPS Kota Malang



Erny Fatma Setyoharini

DAFTAR ISI



	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Kependudukan	1
1.1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk	1
1.2. Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga ...	2
1.3. Kepadatan dan Persebaran Penduduk	3
1.4. Rasio Ketergantungan	4
2. Kesehatan	6
2.1. Angka Harapan Hidup.....	7
2.2. Tingkat Morbiditas	7
2.3. Imunisasi dan Gizi Balita.....	8
2.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	10
2.5. Program Keluarga Berencana	11
3. Pendidikan.....	13
3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	13
3.2. Angka Partisipasi Murni (APM).....	15
3.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	16
4. Ketenagakerjaan.....	18
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	19
4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	21
4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	23

	Halaman
4.4. Jumlah Jam Kerja	24
4.5. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan.....	24
5. Taraf dan Pola Konsumsi	26
5.1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	27
5.2. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk.....	28
5.3. Konsumsi Energi dan Protein	29
6. Perumahan dan Lingkungan.....	31
6.1. Kualitas Rumah Tinggal	31
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal	32
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal	32
7. Kemiskinan	34
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Malang	34
7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	36
8. Sosial Lainnya.....	38
8.1. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	38
8.2. Akses Terhadap Jaminan Kesehatan	39
8.3. Penduduk yang Mengalami Tindak Kejahatan	40



Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu daerah. Namun demikian, berbagai persoalan kependudukan yang tidak tertangani dengan baik, justru akan menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk yang terus bertambah serta komposisi dan distribusi penduduk yang mengalami perubahan, perlu dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah, jika ketersediaan perumahan tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya permasalahan pemukiman. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan resiko kenaikan tindak kriminalitas, penurunan tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah akibat keterbatasan sarana pendidikan. Berbagai persoalan ini dapat dihindari dengan kebijakan tepat sasaran yang mempertimbangkan berbagai indikator kependudukan.

1.1 JUMLAH DAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan proyeksi penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2020 sebesar 874.890 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 hingga 2020 sebesar 0,81 persen per tahun. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sebesar 4.028 jiwa. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, jumlah penduduk Kota Malang telah mengalami penambahan sebesar 6,66 persen, atau dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penambahan penduduk sebesar 54.647 jiwa.

Tabel 1.1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Malang, 2016-2020

Tahun	Penduduk (juta jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
2016	856.410	97,27
2017	861.414	97,30
2018	866.118	97,28
2019	870.682	97,31
2020	874.890	97,31

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang dalam 10 tahun terakhir berada pada besaran di bawah 100, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,31 dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 443.407 dan penduduk laki-laki sebesar 431.483.

Jumlah penduduk perempuan yang lebih besar daripada penduduk laki-laki di Kota Malang dalam 10 tahun terakhir, memerlukan kebijakan yang ramah perempuan. Hal ini telah sesuai dengan pencaanangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sebagai Kota Responsif Gender. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, persentase penduduk perempuan terbesar, berada pada kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebesar 20,48 persen dari total penduduk perempuan di Kota Malang. Kelompok umur 20-29 tahun ini secara umum merupakan kelompok umur dominan dari para pencari kerja, sehingga penyediaan lapangan kerja yang ramah perempuan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi gender yang ada di Kota Malang.

1.2 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA

Rumah tangga didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makan dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Makan

dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Indikator demografi yang juga dapat menjadi pedoman pengambilan kebijakan adalah ukuran jumlah rumah tangga dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, jumlah rumah tangga di Kota Malang sebesar 235.114 rumah tangga. Jumlah ini menempati urutan terbesar kedua dari delapan Kota di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya. Kemudian, secara rata-rata anggota per rumah tangga di Kota Malang adalah sebesar 3,72 atau sekitar 3 hingga 4 orang per rumah tangga. Besaran rata-rata anggota rumah tangga yang mendekati 4 ini dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program Keluarga Berencana di Kota Malang.

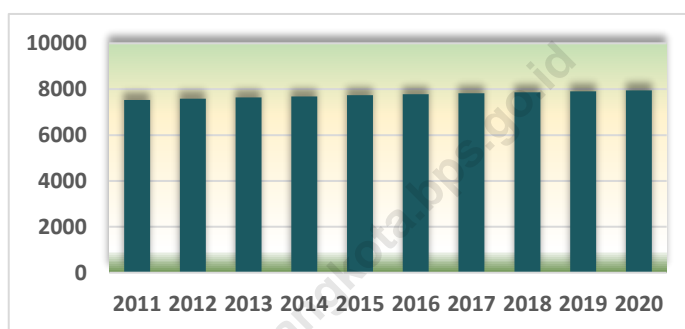
Jumlah anggota rumah tangga yang terkendali, dapat mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan dalam rumah tangga. Apabila terdapat semakin banyak anggota rumah tangga, khususnya yang berada dalam usia non produktif, maka akan meningkatkan beban ketergantungan anggota rumah tangga yang berusia produktif dalam membiayai mereka yang berada di usia non produktif, sehingga akan menimbulkan kendala dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga tersebut.

1.3 KEPADATAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk pada suatu wilayah, dapat menjadi suatu persoalan jika tidak disertai dengan penerapan kebijakan yang tepat. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan dihadapkan pada persoalan ketersediaan lahan untuk pemukiman, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan pada wilayah tersebut.

Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, kepadatan penduduk Kota Malang juga terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Meskipun peningkatan kepadatan penduduk cenderung melandai pada beberapa tahun terakhir.

Penduduk Kota Malang tersebar pada lima kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup variatif pada masing-masing kecamatan. Kecamatan Klojen adalah kecamatan terpadat di Kota Malang dengan kepadatan penduduk sebesar 11.485 jiwa/km², sementara itu Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan kepadatan sebesar 4.921 jiwa/km². Gambaran umum kondisi ini, dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Malang.



Gambar 1.1. Kepadatan Penduduk, 2011-2020 (jiwa/km²)

1.4 RASIO KETERGANTUNGAN

Indikator demografi penting berikutnya adalah angka ketergantungan. Distribusi penduduk menurut kelompok umur pada suatu wilayah, dapat menjadi dasar perhitungan berbagai indikator demografi, salah satunya adalah angka ketergantungan atau yang dikenal dengan *dependency ratio*.

Angka Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi. Indikator ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum memasuki usia produktif dan penduduk yang memasuki usia tidak produktif lagi.

Semakin kecil angka ketergantungan menunjukkan semakin besar jumlah penduduk usia produktif yang diberdayakan dengan optimal, sehingga dapat berguna bagi

pembangunan di bidang kependudukan untuk kemajuan suatu daerah. Kondisi inilah yang pada umumnya disebut sebagai bonus demografi.

Angka ketergantungan penduduk Kota Malang tahun 2020 sebesar 36,64. Nilai ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2020, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 36 orang yang belum produktif dan orang yang dianggap tidak produktif lagi.

Penurunan angka ketergantungan dari tahun ke tahun, dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika beban tanggungan penduduk usia produktif tinggi maka akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena pendapatan penduduk usia produktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga dapat menurunkan nilai investasi dan tabungan yang dilakukan oleh penduduk usia produktif.



KESEHATAN

2

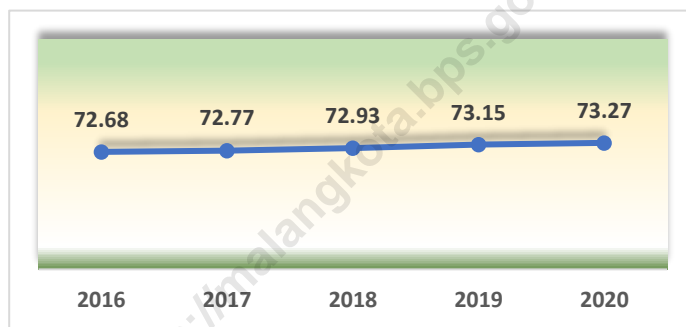
Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang Kesehatan. Sebagai salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan dapat diukur menggunakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat capaian program pemerintah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah mempermudah akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar seperti puskesmas, posyandu, dll. Sasaran utama pembangunan pada bidang kesehatan adalah meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pemerintah. Capaian AHH didapatkan dengan cara menurunkan angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka kematian ibu, menurunkan prevalensi gizi buruk serta kurang gizi, dan utamanya menekan Angka Kematian Bayi.

Program-program Kesehatan dilakukan untuk mencapai berbagai target di atas, diantaranya meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat dijangkau dengan lebih mudah dan merata pada seluruh wilayah. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan melalui pembangunan fasilitas Kesehatan rumah sakit, puskesmas, dll yang didukung dengan penyediaan alat-alat Kesehatan dan obat-obatan yang memadai, termasuk ke dalam rangkaian upaya dalam mencapai target di atas.

2.1 ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka harapan hidup pada suatu umur “x” didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur “x” pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatannya.



Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kota Malang, 2016-2020

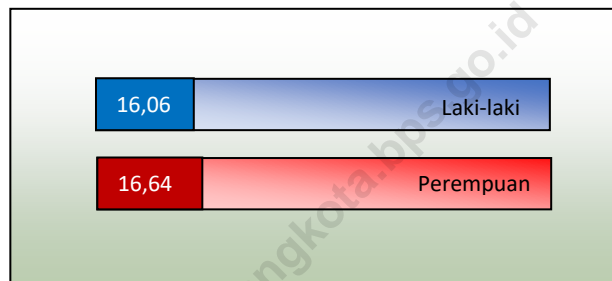
Berdasarkan hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Malang mengalami tren meningkat dari 72,68 tahun pada 2016, hingga menjadi 73,27 tahun pada 2020. Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut dapat diartikan bahwa bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2020, berpeluang hidup hingga usia 73,27 tahun.

2.2 TINGKAT MORBIDITAS

Indikator kesehatan berikutnya adalah angka morbiditas. Morbiditas atau kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan Kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah,

mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Jika semakin banyak penduduk yang mengalami morbiditas maka semakin rendah pula derajat Kesehatan pada wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, angka kesakitan penduduk Kota Malang selama sebulan terakhir sebesar 16,35 persen. Pada gambar 2.1 disampaikan secara lebih rinci mengenai tingkat morbiditas penduduk Kota Malang menurut Jenis Kelamin. Tingkat kesakitan atau morbiditas selama sebulan terakhir pada penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki di Kota Malang pada tahun 2020.



Gambar 2.2 Persentase Tingkat Kesakitan/Morbiditas Penduduk Kota Malang pada Sebulan Terakhir, 2020

2.3 IMUNISASI DAN GIZI BALITA

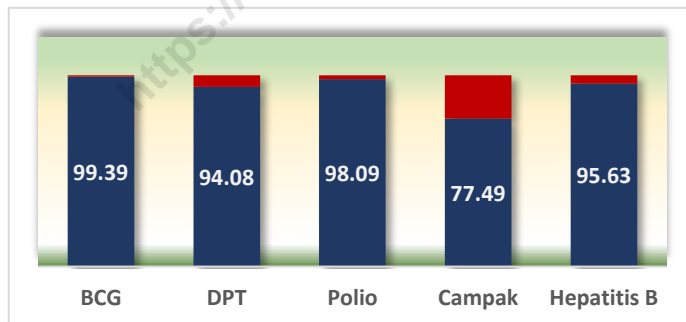
Balita atau anak pada umur 0-5 tahun merupakan prioritas sasaran pembangunan di bidang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi Kesehatan balita dimulai dari saat dalam kandungan, penolong kelahiran, imunisasi dan pemberian ASI.

Pemberian ASI pada bayi diusahakan dapat diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Menurut Kementerian Kesehatan, ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Selanjutnya, setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan Bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Pada tahun 2020, di Kota Malang, persentase bayi berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima ASI Eksklusif sebesar 38,28 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 28,96 persen. Hal ini mengindikasikan mulai adanya peningkatan edukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi.

Selain pemberian ASI, faktor lain yang terkait dengan kualitas Kesehatan balita adalah pemberian imunisasi. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan diperlukan agar dapat mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Pada tahun 2020, balita di Kota Malang yang telah mendapatkan imunisasi lengkap (satu kali untuk BCG dan campak, serta tiga kali untuk DPT, Polio, dan Hepatitis B) sebanyak 69,63 persen, meningkat cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 58,95 persen. Peningkatan cakupan imunisasi untuk balita ini diharapkan dapat meningkatkan imunitas dan derajat kesehatan balita di Kota Malang.



Gambar 2.3 Persentase Balita di Kota Malang menurut Jenis Imunisasi yang Diperoleh, 2020

Berdasarkan gambar 2.1, sepanjang tahun 2020, cakupan imunisasi jenis campak pada balita di Kota Malang masih mencapai 77,49 persen. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan jenis imunisasi dasar lain yang capaiannya sudah mencapai di atas 90 persen. Peningkatan cakupan imunisasi campak pada balita di Kota Malang perlu ditingkatkan.

2.4 PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN

Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, serta meningkatkan kualitas pelayanan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis agar proses persalinan dapat berlangsung sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga Kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kota Malang yang melahirkan anak lahir hidup kurang dari 2 tahun lalu, sebanyak 100 persen perempuan melahirkan di fasilitas Kesehatan dengan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan.

Dalam mengatasi keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk Kota Malang selama satu bulan terakhir, terdapat 51,86 persen penduduk yang berobat jalan, sementara sisanya tidak berobat jalan. Alasan terbesar penduduk untuk tidak berobat jalan adalah mengobati sendiri keluhan kesehatannya sebesar 65,43 persen, dan merasa tidak perlu berobat jalan sebesar 32,08 persen.

Pada penduduk yang berobat jalan, sebagian besar memilih untuk berobat jalan pada dokter/bidan dengan fasilitas Kesehatan yang paling banyak didatangi untuk berobat jalan adalah Puskesmas/Pustu. Kondisi ini mengindikasikan, kualitas pelayanan fasilitas Kesehatan primer di Kota Malang yaitu puskesmas/pustu sudah cukup baik dan dapat menjawab kebutuhan pelayanan Kesehatan dasar penduduk

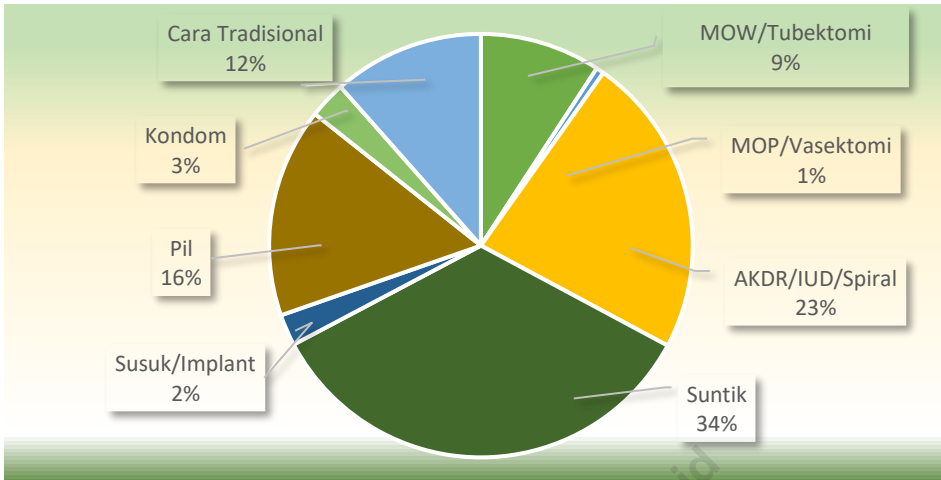
Tabel 2.2. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2016-2020

Jenis Imunisasi (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)
Rumah Sakit	18,38	23,14	31,16	13,99	29,48
Praktek Dokter/Bidan/Klinik	46,72	54,41	42,52	74,57	49,53
Puskesmas	35,77	26,47	29,39	15,34	21,51
Petugas Kesehatan	0,14	0,75	0,93	3,62	0,55
Pengobatan Tradisional	2,18	1,89	4,84	0,80	1,83
Dukun bersalin & lainnya	0,87	0,20	2,63	0,30	0,83

2.5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Sebagai salah satu upaya pengendalian jumlah dan peningkatan kualitas penduduk, pemerintah memberlakukan program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya untuk meningkatkan cakupan akseptor KB khususnya untuk metode kontrasepsi jangka Panjang. Peningkatan cakupan akseptor KB diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020. Di Kota Malang, terdapat 57,70 persen perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB. Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa alat KB jenis suntik adalah yang paling diminati oleh perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Kota Malang.



Gambar 1.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Alat/KB yang Sedang Digunakan



PENDIDIKAN

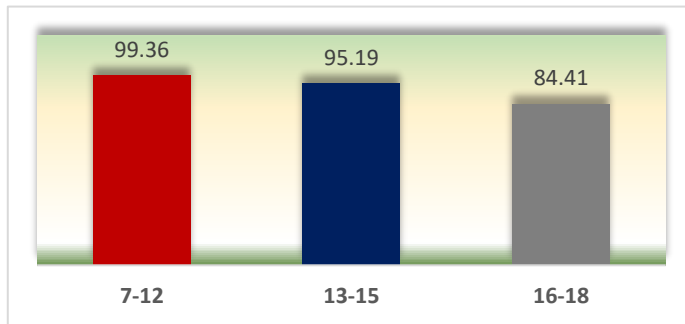
3

Kualitas sumber daya manusia yang handal salah satunya ditentukan oleh aspek pendidikan. Pendidikan dianggap memiliki peran strategis sebagai kunci kemajuan suatu daerah. Peran strategis pendidikan menjadikan aspek ini tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, capaian indikator-indikator bidang pendidikan perlu diperhatikan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Beberapa indikator pendidikan yang dapat digunakan sebagai acuan antara lain: Angka partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan kualitas pelayanan pendidikan

3.1 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

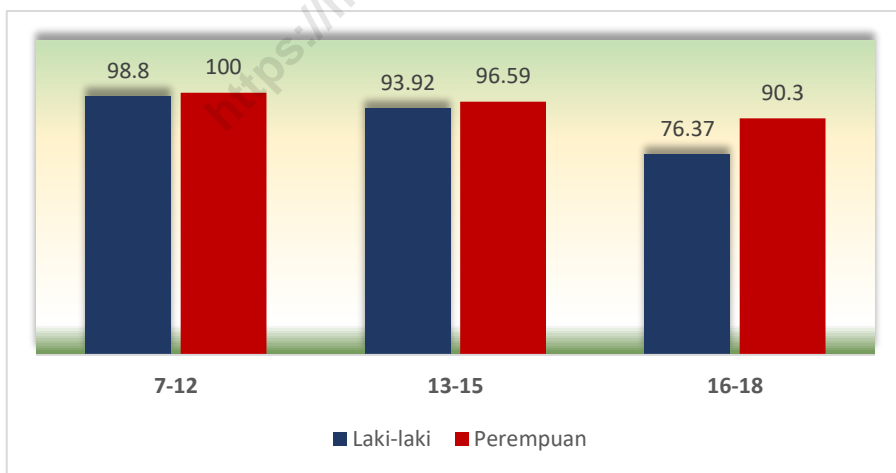
Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar pula jumlah penduduk yang menikmati bangku sekolah.

APS Kota Malang pada tahun 2020 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,36, dan untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 95,19. Sementara itu, untuk APS kelompok umur 16-18 tahun baru mencapai 84,41. Semakin tinggi kelompok umur, APS semakin rendah, hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan sarana pendidikan dalam menampung siswa dan adanya kemungkinan penduduk yang memang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi



Gambar 3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Malang menurut Kelompok Umur, 2020

Bila indikator APS ini dilihat lebih detail berdasarkan jenis kelamin penduduk dan kelompok umurnya, APS Kota Malang tahun 2020 untuk jenis kelamin perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun, sudah mencapai 100 persen. Artinya, seluruh penduduk perempuan usia 7-12 tahun di Kota Malang sedang bersekolah. Sementara itu, masih terdapat 23,63 persen penduduk laki-laki usia 16-18 tahun yang sedang tidak bersekolah.

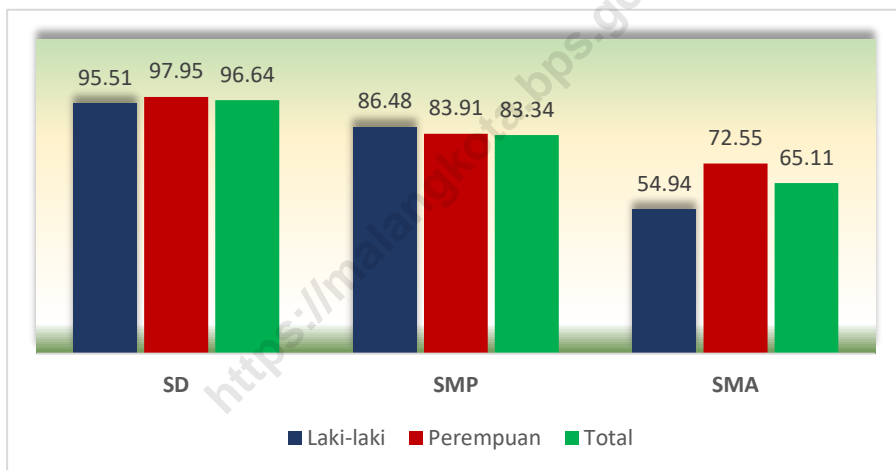


Gambar 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Malang menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk pada kelompok usia tertentu dalam pendidikan, namun APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok umur tertentu yang mengenyam pendidikan sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM).

3.2 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.



Gambar 3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Malang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

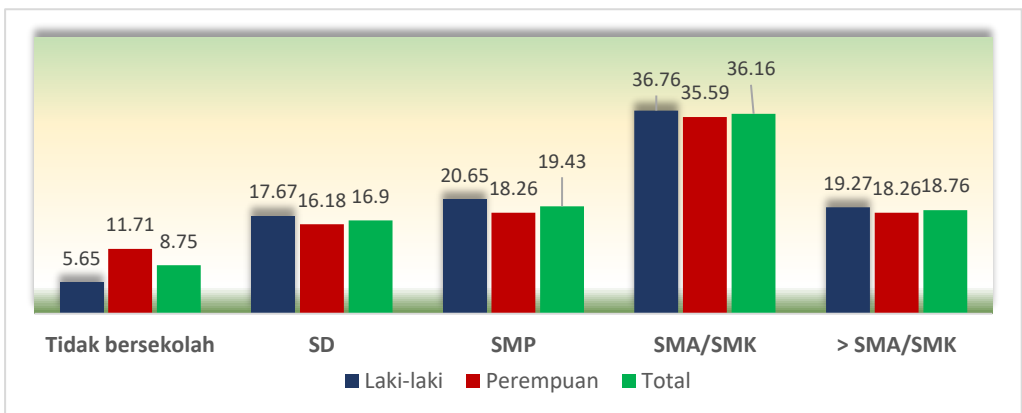
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya terhadap penduduk pada kelompok umur sekolah yang bersesuaian. Bila seluruh penduduk usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100 persen.

Di Kota Malang, pada tahun 2020, APM jenjang SMA untuk laki-laki perlu mendapatkan perhatian, dengan nilai yang baru mencapai 54,94 persen, yang artinya terdapat sekitar 54 persen penduduk laki-laki berusia 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu di jenjang SMA. Masih rendahnya APM ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan sesuai dengan usianya, ketersediaan fasilitas pendidikan, hingga ketidakmampuan secara finansial untuk mengikuti pendidikan.

3.3 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Kualitas sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk, asumsinya kemampuan akses terhadap pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan menjadi semakin luas.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk, maka keahlian yang diperoleh akan semakin besar. Sebagian besar penduduk Kota Malang pada tahun 2020, telah menamatkan pendidikan jenjang SMA/ SMK ke atas, yaitu sebesar 54,92 persen. Namun demikian, masih terdapat 8,75 persen penduduk Kota Malang yang belum mempunyai ijazah SD, termasuk di dalamnya mereka yang sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar.



Gambar 3.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Kota Malang Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020

Sesuai dengan gambar 3.4, pada tahun 2020, di Kota Malang, pendidikan secara umum telah terbagi rata antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang cukup terlihat pada kategori tidak bersekolah, persentase perempuan yang tidak bersekolah di Kota Malang, hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

<https://malangkota.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN 4

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan jangka pendek maupun jangka Panjang. Program ketenagakerjaan merupakan bagian strategis dalam rangka pembangunan nasional karena tenaga kerja merupakan salah satu penggerak roda pembangunan.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

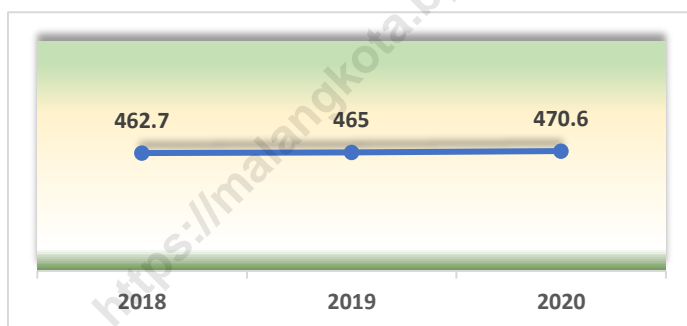
Berbagai proses demografi dapat memengaruhi jumlah dan komposisi tenaga kerja, sehingga akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses tersebut, maka menjadi sangat penting untuk selalu memperbarui data ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi terkini, demi memastikan evaluasi dan perencanaan berjalan dengan baik. Di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, beberapa data ketenagakerjaan yang terkait dengan adanya pandemi juga perlu diulas pada bab ini.

Gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Februari dan Agustus tahun 2019-2020. Pada Agustus 2020, dilakukan pendataan kondisi ketenagakerjaan di era normal baru pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan mengacu pada konsep ICLS 13, dan terdapat beberapa pertanyaan survei yang terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi dari ILO.

Indikator ketenagakerjaan ini sangat dinanti oleh para pengguna data, karena informasi dari indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan pada suatu wilayah salah satunya juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengangguran.

4.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan penduduk bukan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Gambar 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Kota Malang (Kondisi Agustus), 2018-2020 (Ribuan Orang)

Sementara itu, “bekerja” didefinisikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angka TPAK dapat menjadi indikasi potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah.

Semakin tinggi TPAK pada suatu daerah, maka dapat diindikasikan produktifitas pada daerah tersebut semakin tinggi pula.

Pada tahun 2020, jumlah Angkatan kerja di Kota Malang sebesar 470,6 ribu orang, meningkat sebanyak 5 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah Angkatan kerja dari tahun ke tahun di Kota Malang ini, tentunya perlu disikapi dengan kebijakan tepat untuk mengoptimalkan Perkembangan kondisi Angkatan Kerja di Kota Malang dalam rentang tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Indikator Ketenagakerjaan Kota Malang (kondisi Agustus), 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja (usia 15 tahun atau lebih)	orang	698.415	703.648	708.621
Angkatan Kerja (AK)	orang	462.728	465.084	470.610
Bekerja	orang	431.969	437.737	425.368
Penganggur	orang	30.759	27.347	45.242
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	orang	235.687	238.564	238.011
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	66,25	66,10	66,41
Laki-laki	persen	79,18	79,96	78,21
Perempuan	persen	53,85	52,79	55,10

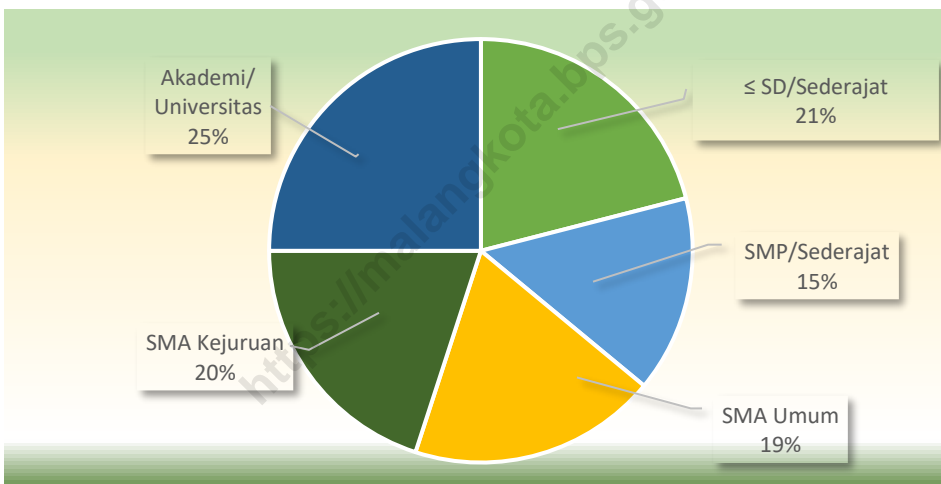
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Malang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dalam kondisi pandemi di tahun 2020, TPAK masih mengalami kenaikan meskipun hanya sebesar 0,31 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai TPAK mengindikasikan peningkatan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada tahun 2020, TPAK laki-laki mengalami penurunan sekitar 1,75 persen, sementara itu TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,31 persen. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya penambahan jumlah perempuan yang masuk sebagai Angkatan kerja, yang sebelumnya masuk ke dalam golongan bukan Angkatan kerja.

Pergeseran ini dimungkinkan sebagai dampak pandemi, sehingga sejumlah perempuan berhenti sebagai ibu rumah tangga, untuk membantu perekonomian keluarganya.

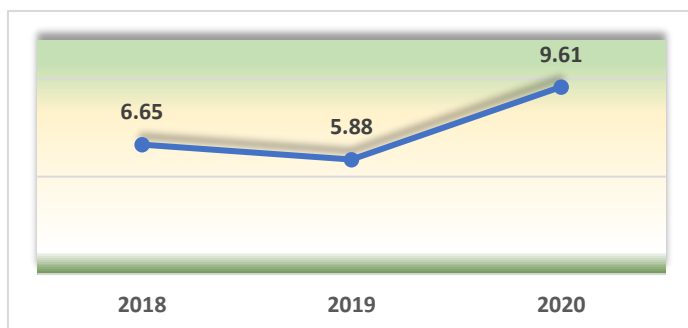
Kualitas tenaga kerja merupakan modal bagi pencapaian produksi, salah satu indikatornya adalah kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Kota Malang. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mengindikasikan kemampuan yang baik dalam bersaing untuk memasuki pasar tenaga kerja. Secara umum, Angkatan kerja di Kota Malang sudah menamatkan pendidikan tinggi. 24,63% dari seluruh Angkatan kerja merupakan tamatan Akademi/Universitas. Hanya 21% dari seluruh Angkatan kerja yang berpendidikan kurang dari dan tamat SD/ sederajat.



Gambar 4.2 Persentase Angkatan Kerja di Kota Malang Menurut Tingkat Pendidikan, 2020

4.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

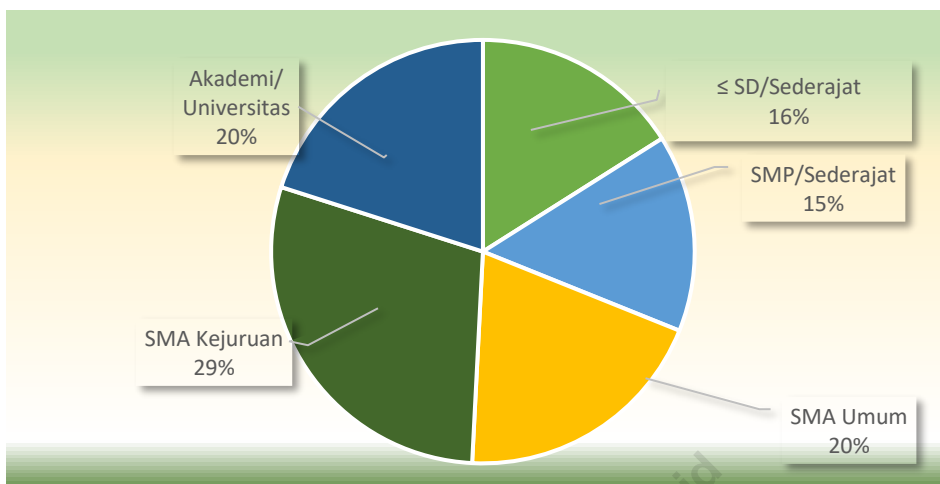
Pembangunan ekonomi pada suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dapat tercapai bila masyarakat mempunyai akses terhadap pendapatan (pekerjaan). Salah satu gambaran tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat didapat dari besaran tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran dapat menyebabkan masalah ekonomi yang berdampak juga pada permasalahan sosial.



Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2018-2020

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan TPT yang cukup besar. Pada tahun 2020, TPT Kota Malang mencapai 9,61 persen. Peningkatan yang cukup besar ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kenaikan jumlah penganggur di Kota Malang, akibat penurunan kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja.

Karakteristik pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penganggur di Kota Malang, sebagian besar penganggur di Kota Malang merupakan tamatan SMK yaitu sebesar 29,12 persen. Kondisi ini dapat disebabkan karena lulusan SMK memiliki keahlian khusus sehingga mereka lebih cenderung untuk memilih pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keahliannya dibandingkan lulusan SMA/MA umum. Distribusi penganggur menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4 Persentase Pengangguran Terbuka di Kota Malang menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020

4.3 LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dibagi menjadi tiga sektor lapangan usaha yaitu, sektor pertanian (primer), sektor manufaktur (sekunder) dan sektor jasa (tersier). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

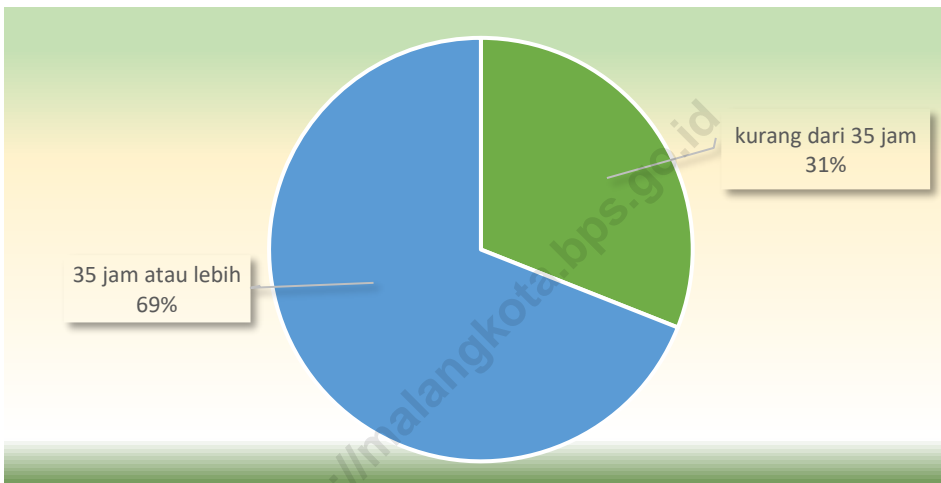
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, Bulan Agustus Tahun 2018-2020

Sektor	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Primer	1,78	1,17	1,10
Sekunder	26,13	22,82	21,38
Tersier	72,09	76,01	77,52

Persentase penduduk Kota Malang yang bekerja di sektor primer dan sekunder terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, sementara itu persentase sektor tersier justru mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja dari sektor tersier di Kota Malang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4.4 JUMLAH JAM KERJA

Apabila dilihat dari jam kerja pada penduduk Kota Malang yang bekerja, sebagian besar yaitu 68,54 persen penduduk bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk bekerja di Kota Malang, yang didominasi oleh pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai. Secara umum, para pekerja ini memiliki jam kerja sekitar 37-49 jam per minggu.



Gambar 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kota Malang yang Bekerja Menurut Kelompok Jam Kerja Seluruhnya Seminggu Terakhir, 2020

Sementara itu, penduduk bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam yang sebesar 31,46 persen di Kota Malang tergolong dalam pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Golongan setengah menganggur pada umumnya dialami oleh pekerja dari sektor-sektor informal.

4.5 DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETENAGAKERJAAN

Dinamika ketenagakerjaan di Kota Malang turut terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dampak pandemi covid-19 pada penduduk usia

kerja di Kota Malang dapat dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: pengangguran, bukan Angkatan kerja, sementara tidak bekerja, dan pengurangan jam kerja. Seluruh komponen ini terbatas pada kondisi yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

Tabel 4.3. Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2020

Komponen	Satuan	Total
(1)	(2)	(3)
a. Pengangguran karena Covid-19	Orang	18.528
b. Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19	Orang	2.450
c. Sementara tidak bekerja karena covid-19	Orang	9.342
d. Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	Orang	110.802

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Penjelasan:

1. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan Angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Sementara tidak bekerja karena covid-19 adalah penduduk namun karena covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

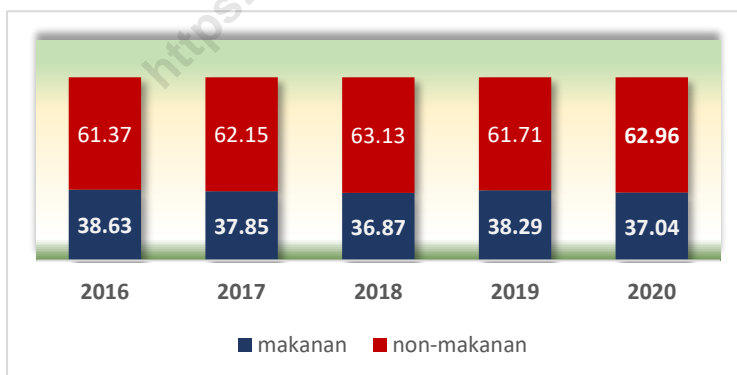


TARAF DAN POLA KONSUMSI

5

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Konsumsi penduduk dipengaruhi oleh factor ekonomi, demografi dan factor lain. Faktor ekonomi dipengaruhi antara lain pendapatan, tingkat suku bunga dan kekayaan; factor demografi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan komposisi penduduk; sedangkan factor lain dipengaruhi oleh kebiasaan adat istiadat dan gaya hidup seseorang.

Pada umumnya konsumsi penduduk dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula konsumsi yang mereka keluarkan. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Dengan demikian, pola konsumsi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu rumah tangga.



Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Penduduk Kota Malang, 2016-2020

5.1 PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Struktur pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran makanan dan non makanan. Dalam 3 tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat Kota Malang, secara umum tidak mengalami perubahan. Konsumsi non makanan masih mendominasi, lebih besar bila dibandingkan dengan konsumsi makanan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Kelompok Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2020

Kelompok Komoditas	Nilai	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Padi-padian	52.354	8,11
2. Umbi-umbian	6.409	0,99
3. Ikan/Udang/Cumi/kerrang	32.601	5,05
4. Daging	33.600	5,20
5. Telur dan Susu	45.199	7,00
6. Sayur-sayuran	41.025	6,35
7. Kacang-kacangan	17.653	2,73
8. Buah-buahan	33.384	5,17
9. Minyak dan Kelapa	13.010	2,01
10. Bahan Minuman	18.894	2,93
11. Bumbu-bumbuan	11.396	1,76
12. Konsumsi Lainnya	11.145	1,73
13. Makanan dan minuman jadi	268.933	41,64
14. Rokok dan Tembakau	60.267	9,33
JUMLAH	645.869	100,00

Hampir setengah dari seluruh pengeluaran makanan masyarakat Kota Malang, dialokasikan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi. Hal ini mengindikasikan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang cenderung mengkonsumsi makanan dan minuman jadi karena kepraktisan dalam memperolehnya.

Selanjutnya, pada kelompok pengeluaran non makanan, sebagian besar pengeluaran per kapita penduduk Kota Malang dihabiskan pada kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga. Dengan selisih persentase yang tidak terlalu besar, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa turut termasuk dalam pendominasi

pengeluaran per kapita non makanan penduduk Kota Malang. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Kelompok Non Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2020

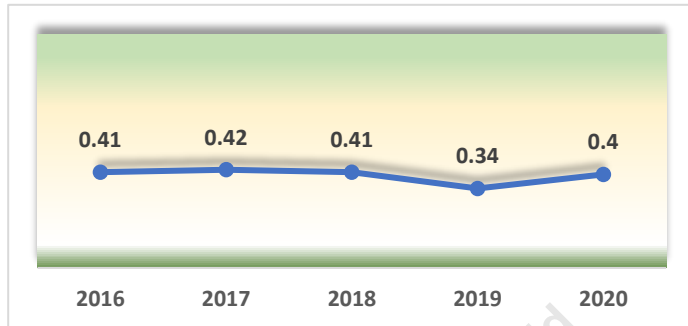
Kelompok Komoditas (1)	Nilai (2)	Persentase (3)
1. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	500.951	45,64
2. Aneka Barang dan Jasa	374.230	34,09
3. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	50.228	4,58
4. Barang Tahan Lama	94.993	8,65
5. Pajak dan Asuransi	60.979	5,56
6. Keperluan Pesta dan Upacara	16.318	1,49
JUMLAH	1.097.700	100,00

5.2 KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK

Pola konsumsi penduduk antar wilayah cukup beragam. Salah satu hal yang melatarbelakangi fenomena ini adalah perbedaan pendapatan penduduk antar wilayah, dan di dalam wilayah itu sendiri. Perbedaan yang terjadi dapat menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada ketimpangan tingkat kemakmuran penduduk antar wilayah.

Badan Pusat Statistik melakukan pendekatan untuk menghitung ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah dengan menggunakan rasio Gini. Nilai rasio Gini yang berkisar antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini

diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Gambar 5.1 Rasio Gini Kota Malang, 2016-2020

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai Rasio Gini penduduk Kota Malang berada dalam kisaran 0,41 hingga 0,34 dan mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2019. Di tahun 2020, rasio gini Kota Malang mengalami kenaikan, mendekati nilai pada tahun 2016-2017 di kisaran 0,4.

5.3 KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2019, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari untuk energi, dan 57 gram per orang per hari untuk protein.

Penduduk Kota Malang, pada tahun 2020, secara rata-rata mengonsumsi energi sebesar 1.922 kilo kalori per hari dan protein sebesar 59,50 gram per hari. Jika dibandingkan dengan angka kecukupan gizi, secara rata-rata, kebutuhan energi penduduk Kota Malang masih belum terpenuhi, namun untuk standar pemenuhan protein menurut AKG telah terpenuhi.

Bila dilihat dari kelompok pengeluaran, terdapat pemenuhan asupan energi penduduk Kota Malang yang memenuhi standar AKG terdapat pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Sementara itu, untuk pemenuhan protein menurut standar AKG, dapat dipenuhi oleh penduduk di kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas. Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, semakin tinggi kesejahteraan maka akan memiliki kemampuan lebih baik untuk memenuhi kecukupan gizinya.

Tabel 5.4 Rata-rata Konsumsi Gizi per Kapita Sehari Penduduk Kota Malang menurut Golongan Pengeluaran, 2020

Jenis Gizi	40% terbawah	40% menengah	20% teratas
(1)	(2)	(3)	
Energi	1.675,01	2.019,67	2.223,58
Protein	47,98	61,87	77,84



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6

6.1 KUALITAS RUMAH TINGGAL

Rumah tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan yang dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan. Kehidupan yang layak dan berkualitas dapat mendorong pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pernyataan ini terlihat bahwa bertempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan bertempat tinggal wajib dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Malang telah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka merupakan salah satu misi pemerintah Kota Malang yang akan dicapai pada rentang waktu tahun 2018-2023. Upaya ini merupakan salah satu strategi yang dirancang untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang merupakan salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan.

6.2 FASILITAS RUMAH TINGGAL

Terdapat indikasi adanya hubungan antara kelompok pengeluaran penduduk dengan fasilitas perumahan yang dimiliki. Seperti yang tertera pada tabel 6.1, terdapat indikasi, fasilitas perumahan yang baik dimiliki oleh penduduk yang berada dalam kelompok pengeluaran yang lebih tinggi. Kondisi ini sejalan dengan asumsi bahwa kondisi kesejahteraan rumah tangga yang semakin baik menyebabkan peningkatan pemenuhan fasilitas perumahan dengan lebih baik pula.

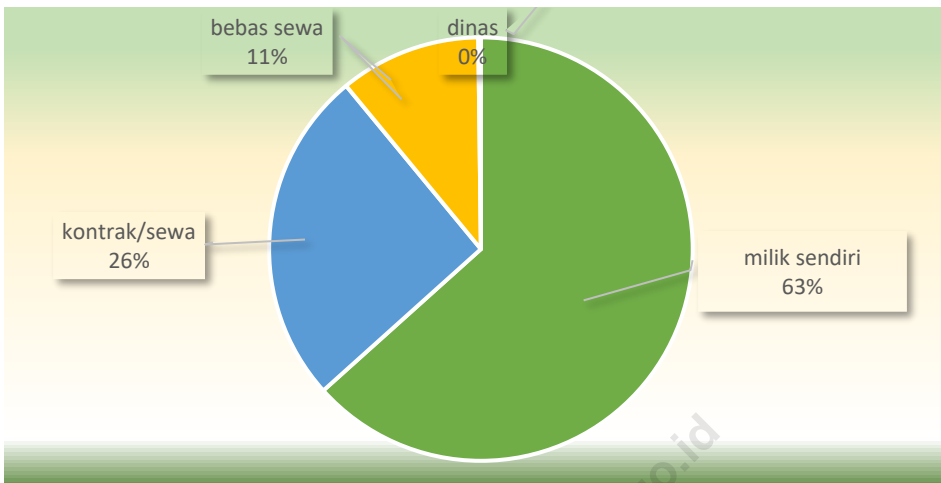
Tabel 6.1 Fasilitas Perumahan Penduduk Kota Malang menurut Golongan Pengeluaran, 2020

Jenis Fasilitas	40% terbawah	40% menengah	20% teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci dari Leding	51,11	52,02	66,64
Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga dari Listrik PLN	100,00	100,00	100,00
Jenis Kloset yang digunakan yaitu leher angsa	98,52	99,47	99,53

6.3 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Memiliki tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Idealnya setiap keluarga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Di Kota Malang, pada tahun 2020, terdapat 63,36 persen penduduk yang memiliki rumah milik sendiri, sementara itu sisanya sebesar 36,64 persen menempati rumah kontrak/sewa, bebas sewa dan rumah dinas. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut ini



Gambar 6.1 Persentase Penduduk menurut Status Rumah yang Ditempati, 2020

<https://malangkota.bps.go.id>



KEMISKINAN



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada poin pertama berisikan tentang upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan kerangka kerja tim pencapaian TPB di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitif, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan.

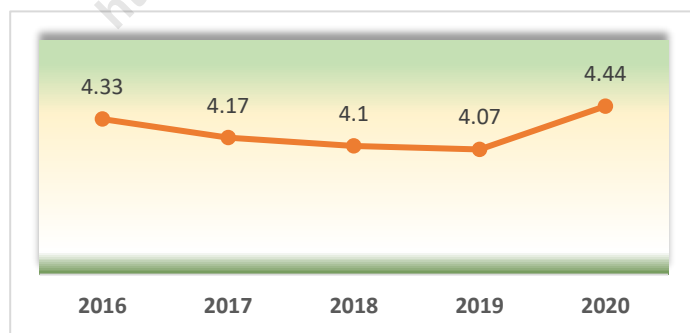
Pada level Kota Malang, berbagai kebijakan juga telah diambil dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, pada Tahun 2020, Jumlah penduduk miskin Kota Malang naik sekitar 3,38 ribu orang dari 35,39 ribu orang (4,07 persen dari total penduduk) pada Tahun 2019 menjadi 38,77 ribu orang (4,44 persen) pada Tahun 2020. Berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang menyangkut berbagai aspek perekonomian dan sosial. Angka kemiskinan penduduk di Kota Malang cukup terdampak, meskipun demikian, indikator kemiskinan pada tahun 2020 merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 yang masih berada di masa-masa awal terjadinya pandemi dimana masyarakat belum terlalu mengalami dampak dari adanya pandemi terhadap kehidupan sosial ekonominya.

7.1 PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI KOTA MALANG

Persentase penduduk miskin di Kota Malang terus diupayakan agar dapat ditekan dari tahun ke tahun. Tren penurunan persentase penduduk miskin di Kota Malang, terus terjadi dalam 10 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk

miskin Kota Malang mengalami kenaikan yang pertama kali dalam satu decade terakhir.

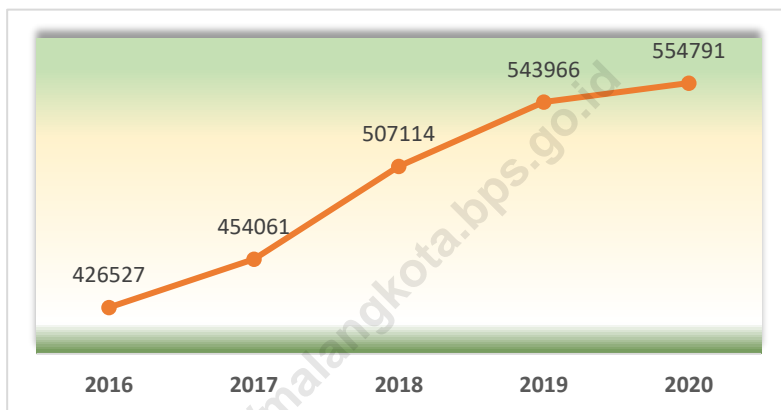
Kenaikan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kota Malang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemungkinan sebagian besar mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) dan kemungkinan penyumbang kenaikan terbesar adalah mereka yang berada pada kategori kemiskinan sementara. Namun hal ini perlu kajian lebih mendalam lagi karena sifat kemiskinan yang begitu dinamis terutama pada kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan, baik mereka yang hampir mencapai garis kemiskinan maupun yang sedikit berada di atas garis kemiskinan. Kelompok ini sangat rentan untuk mengubah komposisi penduduk miskin. Penduduk yang sebelumnya di bawah garis kemiskinan kemudian karena ekonominya sedikit membaik dapat terangkat ke atas garis kemiskinan pada periode berikutnya. Begitu pula sebaliknya dengan mereka yang sedikit di atas garis kemiskinan pada periode sebelumnya, akan dapat turun ke bawah garis kemiskinan ketika perekonomiannya sedikit terguncang.



Gambar 7.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang, 2016-2020

7.2 GARIS KEMISKINAN, INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

Salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah adalah Garis Kemiskinan (GK). Pengukuran GK berfungsi sebagai determinan atau penentu apakah seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin atau tidak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Gambar 7.2 Garis Kemiskinan Kota Malang, 2016-2020

Dalam 5 tahun terakhir, Garis Kemiskinan Kota Malang terus mengalami kenaikan. Kenaikan Garis Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Kota Malang. Inflasi berperan dalam perhitungan garis kemiskinan. Di Kota Malang, angka inflasi relatif terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kestabilan angka inflasi ini menjadi salah satu indikator kestabilan perekonomian di Kota Malang.

Perubahan yang terjadi pada garis kemiskinan berpengaruh pada penentuan siapa saja penduduk yang masuk dalam golongan miskin. Secara makro, hal ini dapat mengindikasikan perlunya kebijakan untuk menjaga kestabilan perekonomian karena dapat berpengaruh pada inflasi yang pada akhirnya akan berdampak pada nilai garis kemiskinan yang terbentuk.

Penentuan garis kemiskinan, memungkinkan untuk melakukan penghitungan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan atau yang dikenal dengan P1 dan P2. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan perubahan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa besar variasi atau keragaman rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri.

Pada Tahun 2020, angka P1 mengalami perubahan sekitar 0,11 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,66. Artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan (GK). Mengingat angka P1 Kota Malang termasuk dalam tiga kabupaten/kota dengan P1 terendah di Jawa Timur bersama Kota Batu dan Kota Mojokerto. Tentunya hal ini dapat memberi semangat positif kepada pemerintah, bahwa dalam menentukan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan ke depan akan lebih mudah dan terarah.

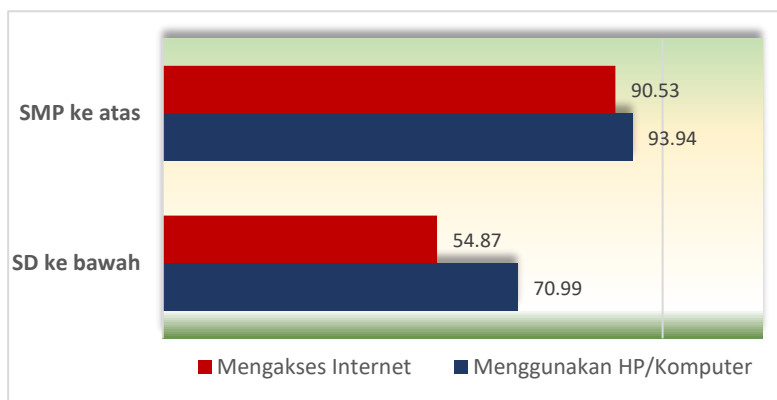
Berkaitan dengan indeks keparahan kemiskinan atau P2, filosofinya adalah jika kondisi kemiskinan para penduduk miskin relatif sama, tentunya akan lebih memudahkan dalam hal menentukan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Karena dengan program yang sama dapat menghasilkan respon yang sama. Namun jika kondisi kemiskinan para penduduk miskin sangat beragam, maka pemilihan dan pelaksanaan program pun harus lebih beragam untuk menjangkau penduduk miskin dengan berbagai kondisi tersebut. Semakin besar nilai P2 maka kondisi ekonomi para penduduk miskin dapat dikatakan semakin beragam. Pada Tahun 2020, Indeks P2 Kota Malang menunjukkan arah yang sedikit kurang baik yaitu terjadi kenaikan 0,02 poin dari 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,15 pada tahun 2020. Berarti bahwa kondisi ekonomi para penduduk miskin Kota Malang semakin beragam.

SOSIAL LAINNYA 8

8.1 AKSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan seluruh masyarakat, terlebih di tengah kondisi pandemi yang membatasi mobilitas dan pertemuan secara fisik. Dengan demikian akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting.

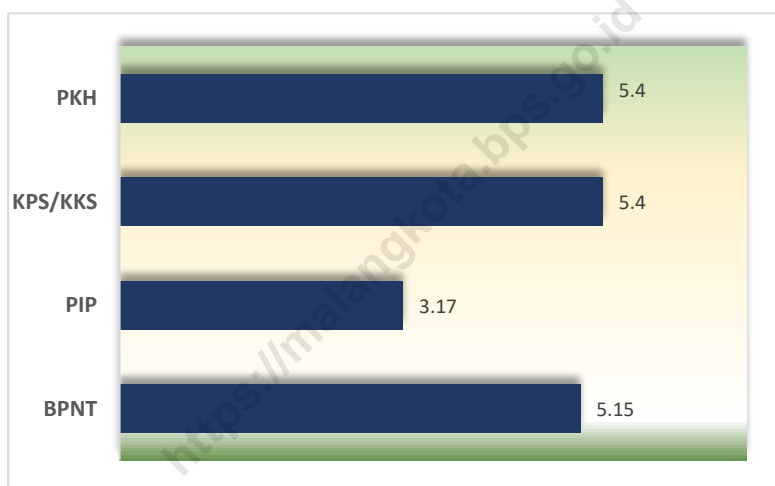
Pada tahun 2020, di Kota Malang, 85,62 persen penduduknya telah memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dengan menggunakan telepon seluler atau computer. Selain itu, terdapat 77,59 persen penduduk Kota Malang yang memiliki akses terhadap internet termasuk media sosial. Dalam 5 tahun terakhir, persentase penduduk yang dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi ini terus mengalami peningkatan. Semakin mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi pada penduduk Kota Malang diharapkan dapat menunjang peningkatan dari segi ekonomi maupun sosial.



Gambar 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2020

Hal yang menarik dapat dilihat pada gambar 8.1. dari kemampuan akses teknologi informasi dan komunikasi pada penduduk Kota Malang di tahun 2020 adalah bila ditinjau dari segi pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk, diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka proporsi penduduk yang mengakses internet menjadi semakin besar pula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik, akan meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengakses internet, yang dituntut untuk semakin baik.

8.2 CAKUPAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



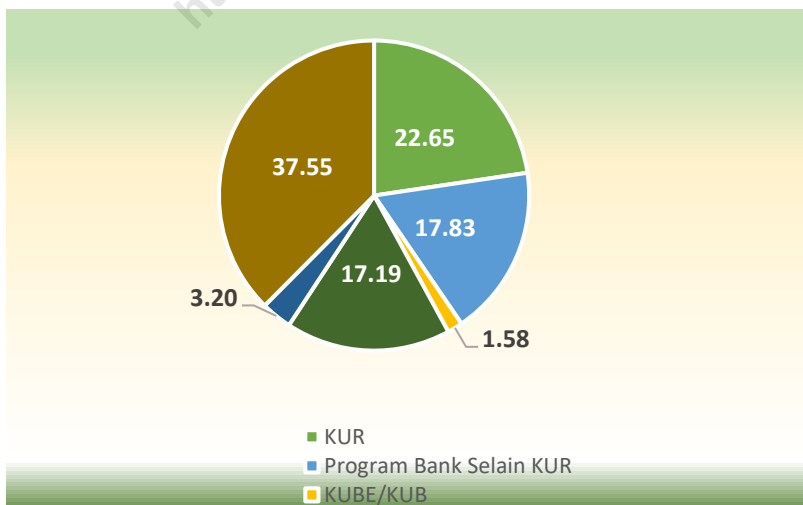
Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2020

Sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah melalui program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada gambar 8.2 dapat dilihat persentase rumah tangga di Kota Malang yang memperoleh perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Seluruh program perlindungan sosial yang ditujukan pada rumah tangga penerima manfaat ini diharapkan dapat menjadi pengungkit taraf kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.

Selain berbagai program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah pusat, sebagaimana tercantum pada gambar 8.2, terdapat pula program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kota Malang. Pada tahun 2020, terdapat 3,17 persen rumah tangga di Kota Malang yang merupakan penerima manfaat dari program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah.

8.3 AKSES TERHADAP KREDIT USAHA

Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pula berbagai upaya perbaikan akses terhadap kredit usaha bagi rumah tangga di Kota Malang. Dengan kemudahan mengakses kredit usaha, harapannya rumah tangga dapat mengurangi permasalahan terkait permodalan usaha sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga serta meningkatkan taraf kesejahterannya. Pada tahun 2020, di Kota Malang, terdapat 25,30 persen rumah tangga yang memperoleh kredit usaha dari berbagai sumber. Distribusi persentase rumah tangga yang memperoleh kredit usaha berdasarkan jenis kredit usaha dapat dilihat pada gambar 8.3 berikut



Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha menurut Jenis Kredit Usaha yang Diterima, 2020

Berdasarkan gambar 8.3 dari seluruh rumah tangga penerima kredit usaha di Kota Malang, masih terdapat 3,20 persen diantaranya yang memperoleh kredit usaha dari perorangan dengan bunga. Sementara itu, sebagian besar penerima kredit usaha, telah memperoleh kredit usaha yang berasal dari lembaga resmi seperti bank atau koperasi.

<https://malangkota.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malangkota.bps.go.id>



*BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG*

Jl. Raya Janti Barat No. 47 Malang
Telp. (0341) 801164, Fax (0341) 805871
Email: bps3573@bps.go.id
Website: <http://malangkota.bps.go.id>

